

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Ideologi merupakan hal wajib yang dimiliki oleh seluruh kader dan pengurus partai sebagai pedoman dalam mengimplementasikan nilai-nilai ideologi ke dalam program, kegiatan, atau aktivitas partai di dalam kehidupan bermasyarakat. Munculnya suatu ideologi tentunya tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Semua partai politik didirikan berdasarkan ideologi dan nilai-nilai yang ingin diusungnya. Hal inilah yang kemudian menjadi identitas partai dan landasan perjuangan serta cita-cita yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, tentunya peranan manusia sebagai pelaku utama sangat penting, maka dibutuhkanlah ideologi guna menjadi pegangan masyarakat dalam mengurus dan menjalankan kehidupannya.¹

Carlton C. Roddy mengartikan ideologi sebagai serangkaian gagasan yang berkaitan secara logis dan merinci prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang memberikan legitimasi terhadap tindakan dan institusi politik, dalam hal ini merupakan partai politik. Menurut Carlton C. Roddy, peran ideologi adalah: memberikan landasan legitimasi bagi pemerintahan, berfungsi sebagai landasan perlawanan terhadap

¹Asmaeny Azis, Dasar Negara Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme dan Kapitalisme dalam Skema Politik Indonesia (Yogyakarta: RUAS Media, 2017), hlm. 19.

kekuasaan status quo, mempersatukan warganegara, dan memandu pilihan kebijakan serta perilaku politik. Prinsip-prinsip perjuangan tersebut berfungsi sebagai sarana komunikasi simbolis antara pemimpin dan massa. Carlton C. Roddy menjelaskan klasifikasi ideologi yaitu: Anarkisme. Anarkisme merupakan pandangan ekstrem mengenai kebebasan individu dan organisasi sosial tanpa kelas atau otoritas. Dalam liberalisme klasik, fungsi pemerintahan dalam negara diminimalkan hingga muncul istilah negara sebagai watchdog. Prioritas nilai ajaran adalah kebebasan individu. Sosialisme adalah teori politik dengan prinsip sentral seperti kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi dan pertukaran pasar harus digantikan oleh bentuk distribusi lain yang berdasarkan pada kebutuhan sosial. Komunisme, dalam tahap awal setiap individu akan bekerja menurut kemampuannya untuk kebaikan bersama tetapi penghargaan kurang lebih akan setara dengan sumbangannya kepada masyarakat. Pada komunisme tahap kedua, produksi barang akan mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga setiap orang dihargai sesuai dengan kebutuhannya.²

Melalui tiga tahapan peristiwa penting, Soekarno menjadi pemikir ideologis di usia muda. Yang pertama adalah interaksinya dengan Tjokroaminoto, kedua adalah pemelajarannya di Suka Miskin, serta ketiga adalah di masa pengasingannya di Ende dan Bengkulu. Kita akan melihat tahapan-tahapan ini, setidaknya sebagai cermin masa ketika pemikiran Soekarno masih murni dan masih perlawanan. Berikut merupakan ideologi dari pandangan Soekarno saat muda: Nasionalisme, Nasionalisme yang

²Ana Triningsih, Ideologi Negara Universitas Esa Unggul. Jurnal Smart Creative and Entrepreneurial. Hlm 2-5.

dikembangkan Soekarno ialah nasionalisme yang mencerminkan sikap anti terhadap kolonialisme dan imperialisme. Penjajahan bangsa Indonesia di bawah kolonialisme memberikan warna tersendiri terhadap Nasionalisme yang dikembangkannya.

Islamisme adalah suatu agama (Islam) yang pada hakikatnya tiada bangsa karena dipeluk oleh berbagai macam ras dan bangsa. Islamisme juga kemudian menjadikan Soekarno muda sebagai salah satu tokoh pemikir pembaharu Islam terbesar di Indonesia. Marxisme adalah ideologi internasional, yang berafiliasi dengan pihak asing. Marxisme, Soekarno pernah mengatakan bahwa pemikirannya pada saat muda paling banyak dipengaruhi oleh ideologi dari Karl Marx tersebut. Marhaenisme adalah ideologi yang diciptakan Soekarno, dengan mengadopsi ideologi sosialisme. Marhaenisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktik,³

Konsep Trisakti Soekarno disampaikan dalam pidato peringatan 20 tahun berdirinya Republik Indonesia pada 17 Agustus 1965 yang berbunyi:

“Sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak tiga hal, yakni: Berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), berkepribadian di bidang budaya” (Ir. Soekarno)⁴

Pada ideologi hasil pemikiran Soekarno yakni Trisakti, gagasan Trisakti memiliki tiga rumus yaitu: (1) Berdaulat dalam politik, (2) Berdikari dalam bidang ekonomi, (3) Berkepribadian dalam kebudayaan. Pidato Trisakti yang diucapkan Soekarno sebenarnya mencerminkan rasa kegelisahan dan kecemasan seorang anak bangsa

³ Irfan Syah Amin. 2020. "Jeljak Ideologi Dalam Pemikiran Soekarno Muda." Department of Government Science. Vol. 7.

⁴ https://www.kompasiana.com/wahidnur/59eccd7d5c814a2a045c7e43/rumusan-tri-sakti-soekarno-di-dalam-pancasila?page=3&page_images=1 Diakses tanggal 18 Januari 2024 Pukul 11:51

terhadap bangsa yang begitu hebat berpengaruh hegemoni budaya Barat, terutama dari Amerika Serikat. Hegemoni dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan politik, ekonomi, dan budaya baik dari segi tatanan nilai maupun tindakan. Untuk melawan hegemoni Barat inilah, Soekarno membutuhkan simbol untuk dilawan. Atas dasar itulah Soekarno menegaskan identitas kebangsaan melalui Trisakti.⁵

Berdaulat dalam politik memiliki pengertian pengakuan utuh atas kedaulatan tertinggi. Kedaulatan ini mempunyai kaitan dengan pengakuan kemerdekaan. Secara teoritis, definisi kemerdekaan pada dasarnya mempunyai dua macam definisi, yaitu de jure dan de facto. Kemerdekaan de jure, yaitu adanya pengakuan dunia internasional secara hukum atas sebuah wilayah Indonesia. Sebaliknya, kemerdekaan de facto, berarti Indonesia diakui mempunyai batas-batas wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sebagai tempat eksistensinya. Dengan pengakuan secara de facto dan de jure, maka negara berhak dalam mengatur negaranya sendiri. Dalam hal kemerdekaan dan tentang kedaulatan politik, maka tidak lepas dari bentuk pemerintahan terkecil. Oleh karena itu, di Kota Jambi sendiri telah menerapkan kedaulatan politik, di mana setiap kegiatan yang mengacu pada cita-cita dari kedaulatan politik ini terlaksana. Kedaulatan politik dapat berjalan sebagaimana mestinya ketika dilakukan berdasarkan peraturan yang diciptakan.

Sebagai prinsip kedua Trisakti, tidak dapat dipisahkan dengan konsep pertama “Berdaulat di bidang Politik.” Artinya, dengan adanya pengakuan atas kedaulatan

⁵Risa Marta Yati, M. Hum. 2020. "Sindang." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*. Vol. 2

wilayah, maka bangsa Indonesia memiliki hak pula untuk mengelola sumber daya ekonomi yang ada tanpa ketergantungan pada bangsa lain. Soekarno pernah mengatakan, “Untuk membangun satu negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan.” Berdikari ekonomi sendiri secara teoritis dimaknai sebagai ekonomi yang dihasilkan kekuatan sendiri, baik dari sumber bahan, tenaga, keahlian, hingga sampai pada persoalan produksi, distribusi, dan pasar. “Tiada Revolusi dapat benar-benar bergelora, kalau rakyatnya tidak menjalankan Revolusi itu dengan anggapan romantik. Tiada Revolusi dapat mempertahankan jiwanya, jika rakyatnya tidak bisa menerima serangan musuh sebagai romantiknya Revolusi, dan menangkis serangan musuh serta menghantam hancur-lebur kepada musuh itu sebagai romantiknya Revolusi.”

Kutipan di atas diambil dari pidato Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diberi judul “Tahun Vivere Pericoloso” atau disingkat dengan Tavip. Kata *Vivere Pericoloso* diambil dari bahasa Italia yang artinya kurang lebih adalah "menyelam ke dalam bahaya." Apa yang dimaksud oleh Sukarno dengan menyelam ke dalam bahaya terkait dengan situasi Indonesia di pertengahan tahun 1960-an. Ketika itu bangsa Indonesia sedang mengalami masa-masa kritis dan penuh bahaya. Dalam konteks regional di Asia Tenggara, Indonesia sedang menjalankan politik konfrontasi dalam menentang pembentukan negara Malaysia yang dinilai sebagai boneka bentukan Inggris, sehingga melahirkan istilah Ganyang Malaysia. Sementara itu, dalam konteks dunia, Indonesia sebagai pemimpin negara-negara non-blok sedang menghadapi

tekanan, terutama dari negara-negara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Oleh karena itu, berdikari ekonomi memiliki dasar kerakyatan, yakni percaya dengan kekuatan bangsa sendiri untuk mengelola sektor ekonomi.⁶

Kepribadian dalam bidang kebudayaan. Makna kepribadian yang dimaksud yaitu sebagai suatu identitas berkenaan dengan individu maupun kelompok, suku serta bangsa yang memiliki unsur kebudayaan. Oleh karena itu, konsep dari gagasan trisakti disini adalah kepribadian bangsa yang lahir dari akar kebudayaan sendiri, tidak mengandalkan kebudayaan bangsa lain. Kepribadian tersebut lalu dapat memanifestasikan menjadi mentalitas, pengetahuan, tradisi, bahasa dan pola hidup yang membedakan jati diri bangsa Indonesia dengan lainnya. Prinsip kepribadian dalam kebudayaan ini dilakukan Soekarno sebagai upaya membendung kebudayaan asing seperti liberalisme dan kapitalisme yang bisa mewujudkan kolonial baru, sekaligus digunakan Soekarno untuk mengubah susunan masyarakat. Di Kota Jambi sendiri hal ini justru menjadi suatu permasalahan karena banyaknya situs kebudayaan yang dibiarkan terbengkalai dan tidak diurus sama sekali untuk itu peran pemerintah dan masyarakat sangat di butuhkan namun di Kota Jambi menjadi sangat tidak seimbang maka penulismelampirkandataketidakseimbanganbudayayangterjadidi Kota Jambi berupatabel sebagai berikut:

⁶Sutrisno, S. (2006). *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Tabell.1
SitusKebudayaanKotaJambiyangKurangdi Perhatikan

Nama	Keterangan
CandiSolokSipinTerbengkalai	Candi ini berlokasi di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin di Kota Jambi. Walaupun belum terlihat secara keseluruhan Candi Solok Sipin memiliki nilai purbakala yang sangat penting karenabanyaknyapenemuanpeninggalan sejarah yang seharusnya di lestarikan. namun yang terjadi justru Candi Solok Sipin menjadi situs yang terbengkalai sehinggamenjadisorotanyangperludi perhatikanoleh pemerintah setempat.
SanggarTariSekintangDayoyangtutup total(Tidak ada aktifitas)	Sanggar Tari Sekintang Dayo hampir 28 bulan tutup total padahal sanggar ini merupakan rumah bagi puluhan seniman taridanmusiksertamenjadisaranatempat belajar ratusan anak – anak. hal ini tentunya menjadi sesuatu yang perlu di perhatikanoleh pemerintahsetempatserta dapat kembali mendukung agar sanggar ini dapat di operasikan kembali karena SeniTaridanMusikmerupakanbagian darikebudayaan.

CagarBudayaMakam Belanda	Cagar budaya makam belanda ini berkawasan di Makalam Kecamatan Beringin Kota Jambi. namun cagar budaya ini tercatat dengan cagar yang tidak terurus sehingga terdapat banyak rumput liar dan banyak mengalami kerusakanpadahaldahulumenjaditempat yang sangat megah dan terurus karena kerusakan yang banyak maka banyak ornamennya yangmemberikan kesan tidak baik, maka dari itu peran pemerintah sangat penting dalam mengembalikan keindahan dan nilai –nilai budayayang terkandung didalamnya.
--------------------------	---

Sumber: Di Olah Penulis

Berdasarkan data di atas maka dapat di simpulkan bahwa Tri Sakti Soekarno yang ketiga yaitu berkepribadian dalam berkebudayaan memiliki permasalahan yang berbeda dengan Tri Sakti Soekarno yang pertama dan kedua hal ini terjadi karena banyaknya permasalahan dalam kebudayaan dimana hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab dari DPRD Kota Jambi dalam memberikan edukasi serta memberikan fasilitas guna melanjutkan pemeliharaan agar situs – situs atau yang berbau budaya tidak berbengkalai apalagi sampai di tutup. Oleh karena itu dalam mempertahankan dan memberikan pemeliharaan diperlukan tindakan aksinyat dari DPRD untuk bentuk memberikan contoh mengenai pemahaman tentang Berkepribadian Dalam Berkebudayaan.

Di Provinsi Jambi, kebijakan pelestarian budaya Melayu telah diatur melalui PERDA No. 7 Tahun 2013 yang kemudian direvisi menjadi PERDA No. 5 Tahun 2023. Peraturan ini menekankan pentingnya menjagadan mengembangkan budaya Melayu

Jambi sebagai bagian dari identitas lokal yang harus dilestarikan, baik dalam sektor pendidikan, pariwisata, seni, maupun ekonomi kreatif. Hal ini sejalan dengan salah satu pilar Tri Sakti yang digagas oleh Soekarno, yaitu berkepribadian dalam kebudayaan. Namun, implementasi kebijakan pelestarian budaya sering kali menghadapi kendala lapangan. Beberapa situs kebudayaan yang seharusnya menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat, kini berada dalam kondisi terbengkalai. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan formal yang dikeluarkan pemerintah daerah dan realitas politik yang dihadapi, khususnya di level legislatif.

Dalam hal ini, peran anggota DPRD Kota Jambi, khususnya dari fraksi PDI Perjuangan, menjadi penting untuk dikaji. PDI Perjuangan yang dikenali sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Sakti Soekarno memiliki tanggung jawab besar dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip berkepribadian dalam kebudayaan ke dalam kebijakan publik, termasuk pelestarian budaya lokal. Nilai-nilai Tri Sakti yang terdiri dari berdaulat secara politik, berkari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan seharusnya menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan mereka.

Kegagalan dalam menjaga dan mengembangkan situs-situs kebudayaan yang terbengkalai dapat menjadi cerminan dari belum optimalnya penerapan nilai-nilai Tri Sakti tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal kebijakan pelestarian budaya telah ada, peran DPRD dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut masih memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepribadian kebudayaan diterapkan oleh

anggota DPRD Kota Jambi dari fraksi PDI Perjuangan periode 2019-2024, terutama dalam kaitannya dengan pelestarian budaya dan situs kebudayaan yang terbengkalai. Studi ini juga akan melihat bagaimana nilai-nilai Tri Sakti Soekarno diimplementasikan dalam kebijakan kebudayaan di tingkat lokal, serta bagaimana kontribusi nyata dari anggota DPRD dalam melindungi warisan budaya Jambi di era modernisasi ini.

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADRT) PDI Perjuangan menjelaskan tujuan partai. Partai mempunyai tujuan umum dan khusus. Tujuan partai umum, (b): berjuang mewujudkan Indonesiasejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat dibidang politik, berdikaridiataskakisendiri dibidangekonomi, dan Indonesiayang berkepribadiandalamkebudayaan. Tujuanpartaikhusus, (c) memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhankebutuhanabsolutrakyat, yaitukebutuhanmaterialberupasandang, pangan, paandankebutuhanspiritualberupakebudayaan, pendidikandankesehatan⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyatdaerah yangberkedudukansebagaiunsurpenyelenggarapemerintahanwilayah di provinsi/daerah kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal18ayat3:“Pemerintahanwilayahprovinsi, daerahkabupaten, dankotamemiliki DewanPerwakilanRakyatDaerahyang anggota-anggotanyadipilihmelalui pemilihan

⁷Pranandaprabowo.2015.AnggaranDasardanAnggaranRumahTanggaPDIPerjuangan. DewanPimpinanPusat PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan

umum”. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah⁸.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas dan wewenang DPRD Kota: Membentuk perda bersama Walikota, Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh walikota, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian, Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian rencana perjanjian internasional di daerah. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang

⁸Wikipedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah. Diakses pada tanggal 06 Juni 2024.

membebani masyarakat dan daerah dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan⁹.

Anggota DPRD Kota dipilih melalui kegiatan pemilihan legislative (Pileg) yang dilaksanakan secara langsung, sehingga calon anggota yang terpilih sebagai anggota DPRD adalah orang-orang yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mewakili suara rakyat. Keanggotaan DPRD Kota sudah diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi:

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Anggota DPRD kota berdomisili di ibukota Provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kota Jambi, Partai Gerindra (14.31%) menjadi yang terbanyak diikuti oleh PDI Perjuangan (11.26%), Demokrat (10.77%) dan Nasdem (9.17%). partai PDI Perjuangan menempatkan 6 kadernya duduk di DPRD Kota Jambi yaitu M.Fauzi, Maria Magdalena, Sutiono, Frans Sugama Tambunan, Suprapti, Junedi Singarimbun. Dari 6 kader tersebut, maka M. Fauzi terpilih menjadi Wakil ketua 1 DPRD Kota Jambi periode 2019-2024. Meskipun M.

⁹Kedudukan, Tugas Pokok, Hak dan Kewajiban. Sekretariat DPRD Kota Serang. Diakses Dari <https://setdprd.serangkota.go.id/pages/kedudukan-tugas-pokok-hak-dan-kewajiban>. Pada Tanggal 06 Juni 2024.

Fauzi bukan merupakan kader yang memiliki suara terbanyak, melainkan pada pemilihan legislatif tahun 2019.

Hubungan dari Tri Sakti Soekarno dengan DPRD yaitu bagaimana Tri Sakti Soekarno dapat diaplikasikan di dalam masyarakat yaitu dengan memberikan contoh serta pemahaman bahwa ini merupakan bentuk dari ketiga Tri Sakti Soekarno yang di cita – cita di Indonesia agar pembelajaran terhadap sejarah tidak hilang dan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah tugas dan tanggung jawabnya agar ketidak seimbangan budaya di daerahnya tidak menjadi suatu permasalahan namun yang terjadi di Kota Jambi justru menunjukkan bahwa Tri Sakti Soekarno mengenai Berkepribadian dalam Berkebudayaan gagal di aplikasikan karena dimana banyak situs – situs yang terbengkalai bahkan salah satunya sanggar di tutup. Maka hal ini menjadi suatu permasalahan yang seharusnya dapat segera di selesaikan oleh DPRD serta menjaga bagaimana Tri Sakti Soekarno pada Berkepribadian dalam Berkebudayaan dapat mencapai cita – cita. Tidak hanya itu DPRD yang memiliki peran penting dalam memberikan pembangunan yang layak bagi masyarakat di daerah kepemimpinannya tentunya mendapat tuntutan tersendiri agar daerah nya dapat mencapai ketiga Tri Sakti Soekarno yang di landaskan untuk memberikan pembangunan yang terstruktur dalam Indonesia termasuk di Kota – Kota Besar maupun Kecil.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Yauman Syarif Anggadifatah tahun 2022 dengan mengambil judul “Penerapan Nilai-nilai Marhaenisme pada Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jambi” Penelitian ini membahas tentang ideologi Marhaenisme yang

di gagas oleh Soekarno dan bentuk penerapannya di DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi serta aspek kebijakan atau peraturan yang diperjuangkan dan ditentang oleh fraksi. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bentuk penerapan nilai-nilai marhaenisme yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi berupa arahan dan amanat partai kepada petugas partai di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial, pembangunan manusia, sektor pertanian, UMKM dan infrastruktur yang berpihak kepada kaum marhaen. corak keberpihakan PDI Perjuangan terhadap kaum marhaen adalah hadirnya peraturan daerah tentang disabilitas, pansus konflik lahan¹⁰

Kemudian penelitian terdahulu yang kedua berjudul “Implementasi Semboyan Tri Sakti Dalam Bidang Kebudayaan Melalui Lokalanta 1956-1965”. Semboyan Tri sakti merupakan prinsip pembangunan yang mengandalkan kemandirian negara pada tiga sektor utama, yakni politik, ekonomi, dan kebudayaan. Khusus dalam bidang kebudayaan, teknologi radio menjadi sangat penting bagi pengembangan dan mempublikasikan produk kebudayaan berupa lagu musik daerah yang sangat beragam di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mendirikan Pabrik Piringan Hitam Lokananta pada 29 Oktober 1956 yang bertujuan untuk mencetak piringan hitam yang berisi lagu musik daerah dan perjuangan dalam memenuhi kebutuhan penyiaran radio Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pendirian dan

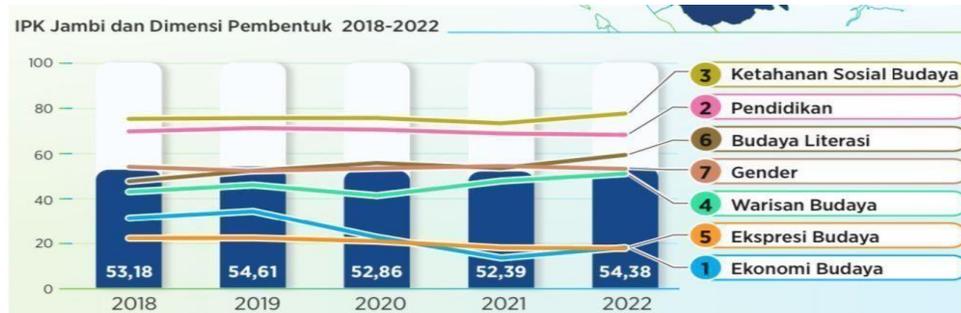
¹⁰ Yauman Syarif Anggadifa, Penerapan Nilai-Nilai Marhaenisme Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jambi. Skripsi. 2022.

kinerja Pabrik Piringan Hitam hingga menjadi Perusahaan Negara Lokananta pada tahun 1961¹¹

Ketua DPP PDI perjuangan, Puan Maharani, menyatakan seluruh kader partai harus mengaktualkan Trisakti sebagai pegangan dasar dalam strategi dan tujuan kebijakan program perjuangan dalam bidang politik, ekonomi dan budaya. Untuk itu konsepsi yang pertama kali diucapkan Soekarno pada 1964 itu harus dijalankan oleh seluruh kader partai dan anggota DPRD Kota Jambi. Penerapan nilai Trisakti Soekarno pada anggota DPRD Kota Jambi ini, harus terstruktur melalui program kerja, seperti membantu rakyat miskin untuk mendapatkan program pemerintah, memberdayakan UMKM dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan cinta tanah air, budaya daerah dan lain sebagainya. Telah diatur dalam tata tertib DPRD Kota Jambi, DPRD memiliki peran tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan fungsi DPRD yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.

¹¹Maria MR. Implementasi Semboyan Tri Sakti Dalam Bidang Kebudayaan Melalui Lokananta 1956-1965. Skripsi. 2015.

Gambar1.1
Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi Jambi

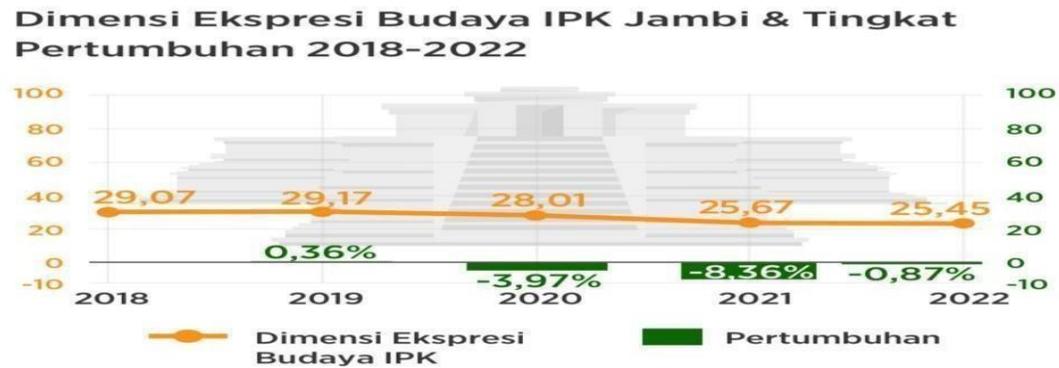


Sumber: E-Book Kemendikbud

Kebudayaan provinsi Jambi, dimensi yang masih sangat lemah adalah dimensi ekonomi budaya dan ekspresi budaya dengan nilai nasional. Dengan nilai indeks dimensi masing-masing sebesar 22,12 dan 25,67, jika dibandingkan dengan dimensi yang lain, dimensi ekonomi budaya mengalami penurunan cukup dalam, sebesar 7,30 poin ini berbeda dengan dimensi ekspresi budaya yang selalu mengalami penurunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Indikator penyusun dimensi ekonomi budaya hanya presentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan itu sebagai sumber penghasilan. Capaian indikator ini di provinsi Jambi sebesar 0,22%. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari 500 penduduk di Jambi, hanya ada sekitar 1 orang yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan.

Gambar 1.2
Dimensi Ekspresi Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jambi dan Tingkat Pertumbuhan 2018-2022



Akibat dari Pandemi Covid-19, Dimensi Ekspresi Budaya IPK Jambi turun sebesar 3,97% di 2020. Di 2021, tren negatif Dimensi Ekspresi Budaya IPK Jambi berlanjut hingga mencapai 8,36%, dari 28,01 menjadi 25,67. Utamanya akibat dari kebijakan PPKM yang berimbas pada rendahnya indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir. Setelah pandemi selesai di 2022, Dimensi Ekspresi Budaya IPK masih turun sebesar 0,87%. Pandemi Covid-19 mengakibatkan seluruh aktivitas masyarakat terhenti karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan oleh pemerintah, kegiatan disanggarkan seperti pembelajaran, penciptaan, hingga produksi karya seni yang diikuti oleh anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jambi ikut terhenti. Pemerintah Jambi mengupayakan agar kegiatan seni tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan membuat program KoSak (Konten Sahabat Komunitas) yang didorong

oleh BPCB Jambi. Program ini memproduksi konten yang mengangkat budaya lokal dengan melibatkan pelaku seni dan budaya lokal.

Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN NILAI-NILAI TRI SAKTI SOEKARNO PADA ANGGOTADPRDKOTAJAMBIPDIPERJUANGAN2019-2024(StudiKasus : Berkepribadian dalam Kebudayaan Pada Situs Kebudayaan Terbengkalai)”**

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena penelitian terhadap Trisakti Soekarno yang berhubungan secara langsung dengan DPRD belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dengan menempuh analisis secara meluas.

RumusanMasalah

Bersumber dari latar belakang yang telah dipaparkan hingga yang menjadi suatu rumusan permasalahan dalam kajian ini yaitu:

1. Bagaimana proses penerapan nilai-nilai Trisakti pada anggota DPRD Kota Jambi 2019-2024 Partai PDIP Perjuangan (Berkepribadian dalam Kebudayaan)?
2. Apa saja yang menjadi tantangan penerapan nilai-nilai Trisakti pada anggota DPRDKotaJambi2019-2024PartaiPDIPPerjuangan(Berkepribadiandalam kebudayaan) ?

TujuanPenelitian

Penelitian ini diterapkan untuk target yang diinginkan tercapai sehingga dapat memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Trisakti pada anggota DPRD Kota Jambi Partai PDIP Perjuangan 2019-2024.
2. Untuk mengetahui tantangan penerapan nilai-nilai Trisakti pada anggota DPRD Kota Jambi Partai PDIP Perjuangan 2019-2024.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian Manfaat Teoritis Penerapan Nilai-Nilai Trisakti pada Anggota DPRD Kota Jambi Partai PDIP Perjuangan 2019-2024:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan bahan rujukan dan kajian, khususnya untuk akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, dalam mengetahui dan memahami pemikiran politik yang berkembang serta di kembangkan di Indonesia. Utamanya, penelitian ini berfokus pada nilai-nilai ajaran Trisakti yang digagas oleh Soekarno serta bentuk penerapannya dalam bidang kepartaian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan penalaran ilmu politik yang berguna bagi pembaca. Penelitian ini juga memberikan penjelasan mengenai PDIPerjuangan dan penerapan nilai-nilai Trisakti pada anggota DPRD Kota Jambi Partai PDIP Perjuangan 2019-2024.

Landasan Teori

Teori merupakan landasan bagi penulis dalam menganalisis fakta yang terdapat di lapangan. Beberapa pendapat para ahli yang akan digunakan dalam pendeskripsian indikator dan mengidentifikasi fakta lapangan menjadi media bagi peneliti dalam pemecahan fakta-fakta di lapangan. Berikut teori yang akan digunakan peneliti, yaitu:

Teori Pengambilan Keputusan

Brinkloel adalah salah satu pakar ahli yang mencetuskan teori pengambilan keputusan, menurutnya satu diantara kunci dalam pengambilan keputusan ialah jika kerangka yang tepat sudah diselesaikan, dan jika keputusan dibuat suatu mulainya terjadi.

Sehubungan dengan pendekatan yang telah diutarakan, lahirlah berbagai aliran yang menampilkan teori-teori pengambilan keputusan menurut Brinkloel, yaitu:

1. Birokratik (Bureaucratic)

Keputusan birokratik merupakan keputusan terprogram dan rutin, keputusan repetitif, keputusan yang pengulangan yang didesain. Keputusan repetitif karena berbagai peraturan dan prosedur sebagai dasar dalam membuat keputusan telah dilembagakan. Peraturan dan prosedur semacam itu banyak dijumpai di kalangan birokrasi. Suatu organisasi disebut birokratik bukan karena organisasi itu adalah organisasi pemerintahan, tetapi karena kompleks. Dengan begitu birokrasi terdapat juga dalam kalangan berbagai jenis organisasi.

2. Manajemen Saintifik (Scientific Management)

Teori scientific management merupakan manajemen yang menggunakan ilmu (science) dan metode ilmiah. Sedangkan metode ilmiah ialah suatu pendekatan yang tepat terhadap suatu objek ilmu yang arah utamanya adalah untuk menambah

pengetahuan yang sudah ada. Teori ini mengandalkan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan ke dalam faktor logis, yang dapat digambarkan secara ilmiah.

Sementara manajemen sendiri memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah.

3. Hubungan Kemanusiaan (Human Relations)

Teori ini menganggap bahwa organisasi dapat bertindak lebih baik apabila lebih banyak pandangan yang diberikan kepada manusia dalam organisasi, layaknya yang menimbulkan kepuasan kerja, pelan serta dalam pengambilan keputusan, memperlakukan sistem organisasi sebagai suatu kelompok sosial yang mempunyai tujuan. Selain itu, kebutuhan dan keinginan anggota selalu memperhitungkan dalam membuat keputusan.

4. Rasionalitas

Teori ini menganggap bahwa sejumlah alternatif bagi penyelesaian masalah yang merupakan pandangan determinisme telah ditetapkan. Teori pengambilan keputusan juga menganggap sebagai makhluk yang sadar terhadap setiap konsekuensi dari alternatif yang dipilih dan keputusan yang dibuat. Perkiraannya adalah terdapatnya peringkat nilai alternatif solusi. Teori keputusan ini juga memperkirakan pengambil keputusan mempunyai informasi yang sempurna terhadap seluruh tingkat peluang dari sebuah peristiwa yang tidak pasti.

5. Satisficing

Teori ini mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini percaya bahwa para manajer yang selalu di penuh keberagaman masalah mampu membuat

keputusan yang rasional. Para pimpinan sesungguhnya bercita-cita membuat keputusan yang rasional, tetapi karena keterbatasan kognitif, ketidakpastian, dan keterbatasan waktu, serta memaksa mereka mengambil keputusan dalam kondisi rasionalitas yang terbatas.

6. Analisis Sistem

Teori ini percaya bahwa setiap masalah-masalah berada dalam suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan. Tujuan utama dari analisis sistem yaitu mendidik para pengambil keputusan untuk berpikir dengan kaidah yang teratur menyeluruh, lebih dari sekedar menyusun formula, atau bermain dengan angka-angka dan komputer. Hal ini merupakan suatu keterampilan memanfaatkan perangkat komputer secara relatif, tetapi juga yakin penilaian objektif manusia tentang masalah dan peluang.

7. Rasional Komprehensif

Teori ini merupakan yang paling dikenal serta banyak disambut oleh semua kalangan, dengan unsur-unsur: (a) adanya perbandingan masalah dengan yang lainnya, (b) Tujuan, nilai atau sasaran yang jelas untuk dipedomani untuk mengambil keputusan, (c) berbagai alternatif untuk memecahkan masalah diteliti secara seksama, (d) dampak yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih diteliti terlebih dahulu, (f) Setiap alternatif dan masing-masing dampak yang menyertainya, dapat dibandingkan dengan alternatif lainnya, (g) Pembuat keputusan akan memilih alternatif serta akibat-akibatnya yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai atau sasaran yang telah ditetapkan.

8. Incremental

Teori ini merupakan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Pokok dari teori ini, ialah (a) Pemilihan tujuan atau sasaran dianalisis secara empiris yang diperlukan untuk mencapainya dipandang sebagai sesuatu yang saling berkaitan, (b) Pembuat keputusan hanya memperhitungkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan masalah pokok masalah, (c) Alternatif yang dipilih, hanya sejumlah minim akibat yang mendasar saja akan dievaluasi, (d) Bahwa tiada keputusan yang tepat bagi setiap masalah. (e) Pembuat keputusan yang incremental pada hakikatnya bersifat perbaikan kecil dan hal ini lebih diarahkan untuk memperbaiki kesempurnaannya dari upaya faktual dalam mengatasi masalah sosial yang ada sekarang daripada sebagai upaya untuk menyodorkan tujuan sosial yang sama sekali baru di masa mendatang.

9. Pengamatan Terpadu

Teori ini memperhitungkan baik keputusan yang bersifat dasar maupun yang bersifat berkembang sedikit demi sedikit dan memberikan urutan teratas bagi proses pembuatan kebijakan dasar yang memberikan arahan umum dan proses pembuatan kebijakan berkembang yang melapangkan jalan bagi keputusan dasar sesudah keputusan ini tercapai.

10. Atribusi

Teori ini mengembangkan pengertian mengenai cara kita menilai individu secara berlainan, berpandangan makna apa yang kita kaitkan pada perilaku tertentu.

Secara fundamental teori atribusi mengutarakan bahwa bila kita mengamati perilaku seseorang, kita berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Meskipun demikian, penentuan tersebut sebagian besar berpulang pada faktor: 1) kelunikan, 2) konsensus, dan konsistensi.¹²

Sehubungan dengan penjelasan teori pengambilan keputusan menurut Brinkloel, penulismeninjaudenganmenghubungkanmasalahyangterjadidilapanganbahwaada dua poin teori menurut Brinkloel yang cocok digunakan dalam penelitian. Yaitu:

1. HubunganKemanusiaan (Human Relations)

Berdasarkan penjelasan, teori ini melibatkan perhatian secara kemanusiaan, ketidakpuasan,danmemperhatikansetiappendapat.Jikadikaitkandenganmasalah di lapangan, teori ini relevan dengan situasi kebudayaan yang terbelengkalai. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan banyak para seniman, komunitas budaya yang merasakan langsung dampak negatifnya.

2. RasionalKomprehensif

Berdasarkan penjelasan, teori ini relevan dengan posisi tugas dan fungsi anggota partai sekaligus anggota DPRD.

Faktor-FaktorPengambilanKeputusan

Penting sekali untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil suatu keputusan, agar ke depannya bisa menghindarifaktor-faktortersebut.Beberapakeputusantidakmemilikidampakyang

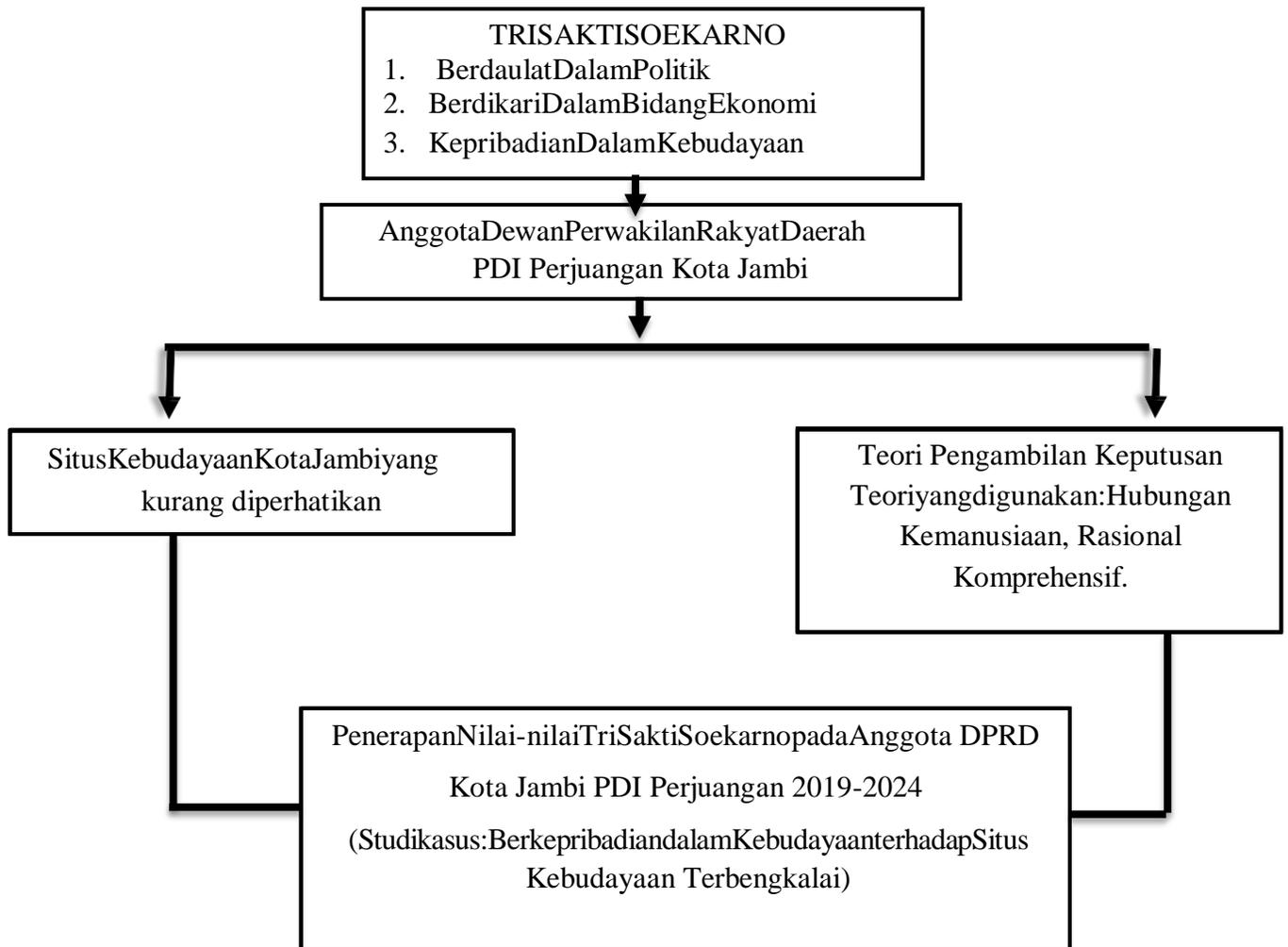
¹²El-Book,Dr.HarbaniPasolong,M.Si.. "TeoriPengambilanKeputusan."CV Alfabelta, Bandung, 2023, hlm. 28-32.

besar terhadap suatu organisasi, sementara keputusan lainnya dapat menentukan keberhasilan atau kehancuran suatu organisasi. Oleh karena itu, sebaiknya mengambil keputusan dengan hati-hati serta bijaksana.¹³

¹³Ibid, hlm.34.

Kerangka Pikir

Gambar 1.3 Kerangka Pikir



Kerangka ini digunakan sebagai rangkaian pemikiran untuk menyelesaikan suatu masalah, mengikuti kerangka konseptual yang logis untuk memfasilitasi proses penelitian ini. Dari kerangka berpikir di atas, Nilai-nilai Tri Sakti Soekarno merupakan pedoman yang dianut oleh seluruh elemen partai PDI Perjuangan, termasuk anggota DPRD dari partai PDI Perjuangan. Salah satu nilai dari Tri Sakti Soekarno yaitu adalah

kepribadiankebudayaan.Menjadipertanyaandantandatanya terhadapkinerja anggota DPRD dari partai PDI Perjuangan melihat situasi kebudayaan yang terbelengkalai. Untukmengkajimasalahini,penelitimenggunakan teoripengambilankeputusan yang dikemukakan oleh Brinckloelyaitu HubunganKemanusiaan,RasionalKomprehensif. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan adanya kendala dalam Penerapan nilai-nilai Trisakti Soekarno pada anggota DPRD Kota Jambi PDI Perjuangan 2019 - 2024 (Berkepribadian dalam kebudayaan).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan wawancara terbuka untuk menganalisis dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Deskripsi ini hanya membahas satu metode, yaitu wawancara terbuka. Hal penting dari definisi ini adalah membahas apa yang diteliti, yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang.¹⁴ Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian penerapan nilai-nilai Trisakti Soekarno pada anggota DPRD Kota Jambi PDI Perjuangan 2019-2024 (Studi Kasus: Berkepribadian dalam kebudayaan terhadap Situs kebudayaan terbelengkalai) adalah karena fakta, hambatan, kendala, serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah dianalisis dengan menggunakan penggambaran secara mendalam yang kemudian diperoleh kesimpulan yang akan

¹⁴Prof. Dr. Lelexy J. Molelong, M.A. "Metodologi Penelitian Kualitatif", Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989-2016, hlm. 5.

menjawab permasalahan mengenai penerapan nilai Tri sakti Soekarno pada anggota DPRD Kota Jambi PDI Perjuangan 2019-2024 (Studi Kasus: Berkepribadian dalam Kebudayaan terhadap Situs kebudayaan terbelengkalai).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan lokasi yang sangat tepat dalam melakukan penelitian. Penentuan lokasi yang tepat sangat diperlukan guna mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Jambi.

Fokus Penelitian

Agar peneliti dapat memahami penelitian yang dilakukan dan dapat mencapai tujuan penelitian yang telah disusun, maka penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan kepribadian dalam bidang kebudayaan terhadap nilai-nilai Tri sakti Soekarno pada anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Jambi.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. **Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dari sumber asli atau informan untuk mendapatkan data atau informasi secara faktual. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan informan yang mendominasi atau memahami mengenai Tri sakti Soekarno.

2. SumberDataSekunder

Sumber data sekunder adalah bahan penunjang penelitian yang memudahkan prosespenelitian. Datasekunderbersumberdaribuku-buku,jurnal,skripsi,dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu teori dari buku, jurnal/skripsi, dan data penunjang lainnya.

TeknikPenentuan Informan

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan menggunakan teknik Purposive Sampling atau pemilihan individu dan tempat yang diteliti karena dalam teknikinimenggambarkansecaraspesifikpemahaman tentangpermasalahanrisetdan fenomena.

Tabel1.2
DaftarInforman Penelitian

No	Informan	Keterangan
1.	Ir.M.Fauzi	Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi (Anggota DPRDPDI Perjuangan Kota Jambi)
2.	MariaMagdalena,S.Sos	KetuaFraksiPDIPerjuanganDPRD Kota Jambi (Anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Jambi)
3.	Sutiono,S.T	(Anggota DPRDPDI Perjuangan Kota Jambi)
4.	JunediSingarimbun,S.El	(Anggota DPRDPDI Perjuangan Kota Jambi)
5.	Suprapti,S.El	(Anggota DPRDPDI Perjuangan Kota Jambi)

6.	Dahalim	PenanggungJawab CandiSolok Sipin
7.	Abdul Basit	MasyarakatSekitarCandiSolok Sipin
8.	DatukRadenAhyar,S.H	SejarahwanKota Jambi
9.	Wisnu	Aktivis Pelestarian Budaya Kota Jambi
10.	Drs.AfrizalM.Pd	StafLembagaAdatMelayuKota Jambi
11.	Nofianto	PimpinanSekretariatDinasPariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi

TeknikPengumpulanData

Dalampenelitianini,teknikpengumpulandatamenggunakanduatahap,yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu atau yang akan dilakukandalampengumpulandata.Pengumpulandatabiasanyamenghasilkan catatantertulisyangangatbanyak,transkripwawancarayangdiketik,atau

¹⁵Prof.DR.LEXY J.MOLELONG,M.A."MetodologiPenelitianKualitatif",PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989-2016, hlm. 186.

foto/videotentangpercakapanyangberisipenggalandatayangnantinyadipilah-pilah dan dianalisis.¹⁶

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam hal ini adalah cara untuk memformulasikan teori ke dalam rangkaian konsep yang lebih tinggi tingkatannya berdasarkan keragaman dari kategori dan kawasan yang ada. Reduksi data berarti merangkum, atau memilih keadaan atau peristiwa yang pokok, dan memfokuskan pada kejadian-kejadian yang penting, menentukan tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Dalam tahap ini, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Kemudian setelah data disajikan secara rinci, data tersebut dibahas lebih lanjut.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap penarikan kesimpulan, tujuan utamanya adalah untuk menarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara singkat dan dibahas.¹⁷

¹⁶Ibid, hlm.235

¹⁷Ibid, hlm.247

Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Jadi, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi pernyataan yang ada dalam konteks suatu studi selama mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Dengan kata lain, dengan triangulasi, peneliti dapat memeriksa temuan-temuannya dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, peneliti dapat melakukannya dengan cara:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data,
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.¹⁸

¹⁸Ibid, hlm 330-331